

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Hanifa Salsabila^{1*}, Vita Fitria Sari²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: haniiifasalsabila@gmail.com

Tanggal Masuk:

30 Agustus 2024

Tanggal Revisi:

05 Juni 2025

Tanggal Diterima:

29 Agustus 2025

Keywords: Human Resource Competency; Internal Control System; Financial Reports.

How to cite (APA 6th style)

Salsabila, H., & Sari, V.F. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (3), 1372-1386.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i3.2221>

Abstract

Financial reports are a crucial tool for holding local governments accountable to the public for their financial performance. The purpose of this study was to examine how human resource (HR) competency and the internal control system affect the caliber of financial reports. This research is categorized as quantitative in nature. Primary data are included in the data set. The 23 OPDs that make up the South Solok Regency area's Regional Work Units (SKPD) constitute the study's population. Sampling determination uses purposive sampling as its technique. The sample in this study was obtained from 115 respondents through a questionnaire. The research data analysis technique consists of classical assumption testing, namely normality, multicollinearity, heteroscedasticity tests. Next, a simple linear regression analysis and hypothesis testing were carried out using the SPSS program. The research findings show that the internal control system and human resources have a significant impact on the quality of financial reports.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Fenomena kualitas laporan keuangan yang ditemukan di Indonesia pada era reformasi sektor publik dinilai sebagai sebuah hal yang memberikan daya tarik untuk ditelaah lebih dalam yaitu mengenai tuntutan publik yang menginginkan adanya sikap terbuka dan akuntabilitas pada proses pembangunan manajemen pemerintahan. Dasar pikiran ini didasarkan pada fakta bahwa Badan Audit secara efektif mengidentifikasi ketidaksesuaian tertentu selama proses audit terhadap laporan keuangan pemerintah (Kiranayanti & Erawati, 2016).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengajukan penilaian tahunan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Saat BPK menerbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD, hal tersebut memperlihatkan dimana laporan keuangan sebuah entitas pemerintah daerah telah disusun dan dipaparkan dengan berkualitas dan wajar. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian (TW), dan Pernyataan Penolakan Pendapat atau Tidak

Memberikan Pendapat (TMP) merupakan opini yang dinyatakan oleh pemeriksa opini (Tawaqal dan Suparno 2017).

Riset Agustini dan Arza (2019) mengungkapkan akuntabilitas publik telah meningkat dari tahun 2012-2019, yang mana setiap pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat mengunggah setiap opini WTP dari BPK atas LKPD di situs resmi mereka dan di media massa. Tetapi, perilaku yang sama tidak ditemukan pada konteks transparansi publik, karena hampir separuh dari 19 pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut hanya bersedia merilis sejumlah kecil dokumen (lima hingga tujuh dari total dua belas dokumen) yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan daerahnya dan menyajikan informasi yang memberikan manfaat untuk pemakainya, tetapi fakta yang ditemukan sangat minim dari pemerintah daerah yang mempublikasikan laporan keuangan daerahnya. Agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud, maka sikap transparan dan akuntabel pada tata kelola keuangan negara harus menghasilkan laporan pertanggungjawaban perihal uang dari pemerintah yang dapat diandalkan, konsisten, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, dan dapat diterima secara terbuka. Aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 yang membahas seputar keuangan negara. Pemerintah daerah yang menjadi pelaksana otonomi dan pelaksana tata kelola keuangan wajib menyajikan laporan keuangan yang berupa dan isi laporan sebagai bentuk tanggung jawab atas pengadaan APBN/APBD sejalan terhadap tuntutan akuntansi pemerintahan yang berlaku (Aditya & surjono 2017).

Laporan keuangan diketahui sebagai satu diantara media dari suatu entitas, pada kasus ini pemerintah daerah, mempertanggungjawabkan kinerja perihal keuangannya terhadap masyarakat. Laporan yang bagus adalah satu diantara upaya pemerintah menunjukkan akuntabilitasnya atas izin yang diberikannya, yaitu dalam hal pengelolaan uang negara, dan juga merupakan salah satu cara pemerintah menunjukkan transparansi dalam hal ini. BPK terhadap temuan audit juga bisa dinilai sebagai cerminan laporan yang berkualitas. Data dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki nilai guna untuk membantu pengambilan keputusan dan meningkatkan pemahaman pengguna laporan keuangan (Setyowati, dkk, 2014).

Kualitas laporan keuangan adalah kesesuaian berbasis standar yang dinilai berdasarkan tingkat ketidaksesuaian dan dapat dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan, yang sebagai produk final dari proses akuntansi. Laporan keuangan yang sifatnya formal, termasuk laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, arus kas, perubahan ekuitas, dan CALK, harus bisa dibuat oleh organisasi sektor publik. Aturan yang dibentuk Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara tegas memaparkan laporan keuangan mesti mematuhi prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), mencakup atas relevan, andal, komparatif, dan cerdas. Aturan tersebut mengungkapkan laporan keuangan harus memiliki tujuan, bebas dari pemahaman dan kesalahan yang signifikan, serta bisa dioperasikan (Tawaqal and Suparno, 2017).

Trisnawati (2018) menyatakan bahwa laporan bisa dinyatakan relevan ketika informasi pada laporan terkait bisa memberikan pengaruh pada keputusan bagi pihak yang berkepentingan. Sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya menentukan faktor-faktor khususnya, sistem pengendali secara internal yang memberikan pengaruh pada keakuratan laporan keuangan, terkhusus laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah. Untuk memastikan perlindungan aset, mengoordinasikan dan mengawasi terjadinya kondisi, mematuhi syarat dan alur kebijakan pengendalian internal, memastikan catatan lengkap dan akurat, dan memenuhi kebutuhan akan jaminan, suatu organisasi termasuk pemerintah mesti memiliki sistem pengendalian internal. Sistem ini harus mampu meraih tujuan dari entitas

terkait dengan pencerminan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta rasa patuh pada aturan dan hukum yang diterapkan (Trisnawati 2018).

Teori agensi menjelaskan keterkaitan antara kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah lewat sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk menjamin LKPD yang disajikan telah sejalan terhadap capaian minimal akuntansi keuangan Indonesia, mematuhi aturan dalam undang-undang yang berlaku, dan menyelenggarakan kegiatan operasional yang semakin efektif dan efisien (Ningrum 2018). Tidak bisa diraihinya sistem pengelolaan internal yang bagus akan memberikan dampak pada buruknya kualitas dari laporan bidang keuangan yang didapatkan melalui sebuah entitas (Suwanda 2015), namun jika entitas tersebut telah menetapkan sistem pengendalian internal yang bagus menjadikan seluruh operasi, sumber daya fisik, data dapat diawasi dan terkendali, serta tujuan bisa diraih, risiko bertambah lebih kecil, dan informasi yang didapatkan bermutu. Penelitian terdahulu memperlihatkan dimana sistem tata kelola internal menyumbangkan pengaruh signifikan ditinjau dari kualitas dari laporan bidang keuangan oleh (Mutiana, Diantimala, and Zuraida 2017) yang menemukan bukti empiris bahwasanya pengendalian internal pada satker pada lingkungan kementerian agama Kabupaten Aceh Utara menyumbangkan dampak yang besar pada keterandalan kualitas dari laporan pemerintah daerah seputar bidang keuangan.

Hasil dari penelitian (Mutiana, Diantimala, and Zuraida 2017) mengungkapkan Komponen sistem tata kelola intern seperti pengawasan, pendelegasian wewenang, verifikasi pejabat atas tanggung jawab dan fungsi, kelengkapan dan keabsahan dokumentasi transaksi, pembuatan catatan yang tepat dan akurat, serta proses uji sistem yang berlaku, semuanya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu tata kelola keuangan sebuah negara. Temuan pada penelitian ini relevan terhadap penelitian yang dilaksanakan (Syarifudin Akhmad 2014) dan penelitian (Trisnawati 2018) yang mengungkapkan dimana laporan bidang keuangan yang memiliki kualitas mendapat pengaruh dengan positif oleh sistem pengendalian yang sifatnya internal. Satu diantara penyebab kurangnya pengawasan di daerah adalah perkembangan kondisi di sana. Sistem pengawasan tersebut terdiri dari dua bagian, mencakup atas pengawasan luar yang dilaksanakan oleh lembaga pengawasan masyarakat dan konstitusi, seperti DPR dan BPK, dan pengawasan dari dalam dilaksanakan oleh aparatur dan pengawasan fungsional yang diperlukan (Syarifudin Akhmad 2014).

BPK menjumpai sejumlah kasus kekurangan SPI dan pembuatan laporan, antara lain: a) pembuatan catatan yang tidak akurat; b) ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses penyusunan laporan; c) penyajian laporan keuangan yang terlambat; d) belum memadainya sistem informasi akuntansi dan pelaporan; dan e) minimnya SDM yang kompeten untuk mendukung sistem tersebut (Indriasih, 2014). SDM merupakan unsur selanjutnya yang memengaruhi mutu pelaporan keuangan. SDM adalah kunci atau acuan dari kesuksesan suatu entitas dan entitas tersebut mengandung peilaian yang bagus diakibatkan dari kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan manusianya.

Masih minimnya kualitas LKPD diakibatkan dari kualitas SDM yang tidak memadai (Subrata, 2017). Kualitas bidang laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah turut bisa mendapat pengaruh dari rendahnya SDM, karena banyak staf keuangan di OPD yang tidak memiliki pelatihan akuntansi formal dalam hal tanggung jawab anggaran. Sistem yang paling baik juga tidak akan efektif ketika tidak didukung oleh SDM yang baik, terutama jika menyangkut SDM individual yang mencakup atas pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014) dan pengukurannya ditinjau melalui pengetahuan, keterampilan dan perilaku SDM terkait (Irwan, 2011).

Jika SKPD memiliki SDM yang mumpuni, yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, banyak ikut serta pada pendidikan dan pelatihan, serta memiliki pengalaman pada industri keuangan, yang semuanya dibutuhkan dalam menjalankan sistem akuntansi yang berlaku saat ini, pengelolaan keuangan daerah akan lebih baik. Dengan demikian, SDM

memegang peranan penting dalam kemampuan organisasi untuk menyelesaikan tugas dengan cepat, efektif, dan ekonomis, sekaligus menghemat durasi pada penyusunan laporan bidang keuangan. Hal tersebut disebabkan SDM yang terampil mampu memahami logika akuntansi yang baik dan mampu menyelesaikan tugas dengan cepat, menyajikan laporan keuangan sesuai jadwal, serta menghasilkan pekerjaan yang bermutu (Tawaqal and Suparno, 2017). Temuan dari penelitian terdahulu yang dilaksanakan (Hendri and NR, 2020) mengungkapkan kredibilitas kualitas bidang laporan keuangan pemerintah daerah mendapat pengaruh dari sumber daya manusia OPD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diduga karena sebagian pegawai kurang memiliki kemampuan akuntansi yang memadai untuk menyusun laporan keuangan.

Mengingat SDM merupakan sumber daya yang sangat berharga, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan benar supaya bisa menyumbangkan kontribusi yang maksimal terhadap tujuan dari organisasi pemerintah daerah. Hal ini memperlihatkan dimana laporan bidang keuangan telah disusun sejalan terhadap semua aturan dalam undang-undang yang dijalankan dan dipaparkan dengan konsisten dan dalam waktu yang tepat. (Trisnawati & Wiratmaja, 2018), hal tersebut memperlihatkan mutu laporan bidang keuangan yang pemerintah daerah buat sejalan terhadap mutu SDM yang dimiliki SKPD tersebut.

Kabupaten Solok Selatan berhubung dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahnya bisa dikatakan agak lambat dari kabupaten dan kota yang terdapat pada provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan juga tertinggal dari kabupaten Dhamasraya yang sama-sama berdiri pada tahun 2004, namun kualitas laporan keuangan kabupaten Solok Selatan masih menjadi salah satu PR bagi pemerintah karena nilai kualitas laporannya berada pada nilai C+. Pasca pemekaran, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus berupaya untuk mendorong berbagai inisiatif pembangunan di segala bidang. Setidaknya, hal ini terlihat dari APBD yang selalu tumbuh dari tahun 2005 hingga 2019.

Meningkatnya APBD dapat memberikan indikasi bahwa akan rentan untuk menjadi objek korupsi (*fraud*) di daerah. Kemudian, ditemukannya kasus korupsi proyek pembangunan jembatan Ambayan di kabupaten Solok Selatan (2018) dengan menggunakan dana APBD senilai Rp 14,1 miliar dan laporan kerugian keuangan negaranya telah dikeluarkan BPK sekitar Rp 3,1 miliar. Kejaksaan negeri (Kejari) Solok Selatan berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 1,1 miliar berupa uang pengganti perkara perbaikan pembangunan tebing sungai Batang Bangko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solok Selatan tahun 2016. Selanjutnya, dugaan kasus korupsi proyek sistem untuk menyediakan air minum pada tahun 2022 yang mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp 7,1 miliar.

Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 mempublikasikan pada website resmi maupun media massa bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD telah menerima predikat WTP yang ke-8 kalinya secara berturut-turut dari BPKP Sumbar, namun dalam konteks transparansi publik pada website tersebut hanya mengungkapkan dokumen-dokumen terkait pengelolaan anggaran daerah secara terbatas (www.solselkab.com). Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan melakukan peninjauan terhadap pengaruh dari kompetensi ADM dan sistem pengendalian internal ditinjau dari kualitas dari laporan keuangan. Penelitian ini didasarkan secara teoritis dan didukung oleh penelitian sebelumnya.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan membahas hubungan dari rakyat sebagai pemegang amanah dengan pemerintah sebagai wakilnya, dimana pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat dituntut untuk memberikan amanah kepada rakyat, pihak yang memberikan amanah, dengan penuh tanggung jawab, serta menyampaikan, membuat laporan, dan menyajikan keseluruhan

kegiatan yang sudah diadakan pemerintah.. Hubungan dari agen dan principal muncul saat agen dipercayakan dalam melaksanakan tugas tertentu dan agen memiliki tanggungjawab atas segala tugas yang telah diberikan tersebut. Principal sebagai pemberi tugas juga memiliki kewajiban memberikan imbalan kepada agen atas tugas yang telah dikerjakannya (Bandariy 2011). Menurut (Wahyuni 2019) Menurut teori keagenan bertujuan untuk mencapai tujuan principal dan agent melalui pelaporan keuangan yang merupakan kewajiban agen utama, maka kinerja agen dapat diukur, dievaluasi, dan diawasi dalam kapasitasnya sebagai pemegang amanah rakyat. Menurut Mardiasmo (2002), pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin akuntabilitas dengan cara menyampaikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala tindakannya kepada masyarakat, yang merupakan pihak yang memberikan amanah dan berhak memperoleh pertanggungjawaban dari pemerintah.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan diketahui sebagai satu diantara bentuk peralatan melakukan monitoring pada upaya minimalis terjadinya *agency cost* (Shintia and Erawati 2017). Untuk tiap laporan bidang keuangan yang dibuat ialah komponen dari suatu proses pelaksanaan laporan keuangan yang komprehensif, Berdasarkan standar capaian dari Akuntansi Keuangan yang dipublikasikan oleh ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2012. "Laporan Keuangan dikenal sebagai laporan yang sistematis seputar keadaan keuangan dan transaksi yang dilaksanakan sebuah entitas pelaporan," menurut aturan yang dibuat Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan dibuatnya laporan keuangan ialah untuk memberikan informasi keuangan tentang organisasi kepada pengambil keputusan publik, maka dari itu informasi yang dicetuskan oleh laporan keuangan wajib melewati syarat yang tidak menyebabkan kesalahpahaman. Laporan keuangan harus sebanding terhadap laporan lain bahwa dibandingkan dengan tahun fiskal sebelumnya (Bondan S., Djamhuri, and Rosidi 2017).

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas dari laporan keuangan dikenal sebagai ukuran normalatif yang dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Rahmadani & Adriansyah (2018) mengungkapkan Karena laporan keuangan menjadi produk sampingan dari proses akuntansi sebuah organisasi dan dimaksudkan dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dipakai pada pengambilan keputusan, maka laporan keuangan tersebut harus mematuhi standar kualitas yang tinggi. Prosedur standar yang terlibat dalam informasi akuntansi supaya bisa meraih tujuannya disebut sebagai karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dimuat pada aturan yang buat Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Supaya dinilai berkualitas tinggi, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat persyaratan standar yang mencakup relevan, bisa diandalkan, sebanding, dan bisa dipahami.

Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses krusial yang harus dilaksanakan dengan berkesinambungan dari pemimpin dan staf dalam memberikan kepastian dimana organisasi bisa meraih tujuannya lewat kegiatan operasional yang efektif dan efisien, menyampaikan laporan keuangan, mengamankan aset negara, serta mematuhi aturan undang-undang. Aturan ini selanjutnya menetapkan bahwa istilah "lingkungan pengendalian", "penilaian risiko", "kegiatan pengendalian", "informasi dan komunikasi", dan "pemantauan" mengacu pada komponen sistem untuk mengendalikan secara internal yang telah diterapkan oleh pemerintah di seluruh dunia. Penilaian kualitas dan integritas data akuntansi merupakan salah satu tujuan sistem pengendali secara internal, (Warren dkk, 2005). Sistem akuntansi dapat mengurangi

kemungkinan terjadinya kesalahan dan ketidakakuratan dalam pencatatan atau perhitungan, yang pada gilirannya menurunkan potensi terjadinya kesalahan dalam pemerintahan daerah.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia diketahui sebagai satu diantara sumber daya yang paling krusial dari perusahaan, disebabkan sumber daya manusia bisa membuat konsep, mengorganisir dan mengendalikan sumber daya lainnya yang diraih melalui orang-orang yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi (Karendra, 2016). Menurut Hutapea dalam (Ningrum 2018) mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku unik yang dimiliki setiap orang merupakan tiga elemen yang berperan dalam menciptakan kompetensi SDM. Sederhananya sumber daya manusia (SDM) diketahui sebagai kekuasaan yang datang melalui manusia, bisa disebut dengan tenaga kerja kekuasaan atau kekuatan atau istilah kekuatan personal yang berasal dari manusia.

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

Aditya & Surjono (2017) mengungkapkan dalam menyajikan laporan keuangan kepada pemerintah, prosedur dan langkah-langkah yang ditetapkan oleh sistem akuntansi pemerintah harus diikuti. Eveline (2016) menemukan bahwa proses harus disesuaikan dengan persyaratan dan keadaan pengendalian internal yang baik untuk menghidupkan kembali motivasi organisasi dalam menjaga mutu laporan bidang keuangan. Penelitian turut memperlihatkan (Trisnawati 2018) dimana sistem pengendali secara internal meningkatkan mutu pelaporan keuangan. Jika bertambah baik laporan keuangan organisasi memperlihatkan sistem pengendali internal yang dimiliki organisasi tersebut semakin baik. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka diajukan hipotesis pertama yaitu:

H1: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

Menurut Trisnawati (2018), kompetensi yang dimiliki SDM menyumbangkan pengaruh signifikan ditinjau dari kualitas nilai tukar pemerintah daerah. Kompetensi SDM ialah sebagai kemampuan pegawai untuk bertahan dalam menghadapi ketidakpastian, kesulitan, dan kegagalan guna mengelola pekerjaannya dimana bisa meraih tujuan yang diinginkan (Taman, 2017). SDM mampu memantau dan mengelola proses sesuai dengan prosedur, sehingga SDM dapat melakukan pengendalian internal dalam pemrosesan, penelaahan, dan analisis transaksi keuangan (Eveline, 2016). Menurut Nadir (2017) menunjukkan alat manajemen keuangan tidak bisa memberikan hasil laporan keuangan yang mempunyai kualitas yang tinggi sejalan terhadap standar akuntansi pemerintah yang basisnya akrual di sebabkan kurangnya kualitas SDM yang dimiliki, namun pada pembuatan susunan dan pemaparan laporan bidng keuangan laporan keuangan yang disusun tidak dapat dipisahkan dari proses bantuan dan penggunaan konsultan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka diajukan hipotesis kedua yaitu:

H2: Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kauntitatif. Penelitian kuantitatif dalam bentuk angka untuk dianalisis lebih lanjut melalui analisis data (Sugiyono, 2017). Data primer menjadi sumber data dalam studi ini. Data primer, mengacu pada pendapat Sugiyono (2013), merupakan jenis sumber data dengan akses langsung kepada pengumpul data. Populasi penelitian ini ialah 23 OPD yang tercakup dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Solok Selatan. Strategi pada upaya mengambil sampel untuk studi ini

dikenal dengan sebutan *purposive sampling*, yakni dengan menetapkan sejumlah kriteria yang tepat. Sampel penelitian ini diambil dari 115 responden.

Data primer menjadi sumber data pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, kuesioner dipakai untuk menjadi peralatan untuk melakukan pengumpulan data. Teknik untuk menganalisis data dipakai dalam meneliti data dan instrumen. Validitas dan reliabilitas merupakan dua jenis pendekatan analisis data yang diterapkan dengan instrumen penelitian. Jika suatu instrumen dianggap sah dan dapat dipercaya, instrumen tersebut dapat dipakai. Uji asumsi tradisional, seperti heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas, merupakan prosedur analisis data penelitian. Selain itu, perangkat lunak SPSS dipakai untuk pengujian hipotesis dan analisis regresi linier dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan dari pengukuran statistik deskriptif ini ialah untuk mencari tahu deskripsi umum data, yang mencakup atas mean, nilai maksimum, nilai minimum, dan simpangan baku dari setiap variabel. Secara khusus, pengukuran ini tujuannya untuk mencari tahu pengaruh dari kompetensi SDM (X2) dan sistem pengendalian internal (X1) terhadap mutu laporan keuangan (Y). Terkait dengan temuan pengujian, Tabel 1 menampilkan informasi berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pengendalian Internal	115	43	58	51.37	3.185
Kompetensi Sumber Daya Manusia	115	48	72	58.94	5.486
Kualitas Laporan Keuangan	115	51	68	61.36	3.860
Valid N (listwise)	115				

Dari Tabel 1, diperoleh bahwa variabel sistem pengendalian internal (X1) memiliki rata-rata yang besarnya 51,37 dengan standar deviasi 3,185, serta nilai minimum 43 sedangkan nilai maksimum 58. Variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) pada data tersebut rata-rata nilainya 58,94 dan simpangan baku yang besarnya 5,486. Nilai minimumnya ialah 48 dan nilai maksimumnya ialah 72. Variabel kualitas laporan keuangan (Y) memiliki rata-rata nilai yang besarnya 61,36 dan simpangan baku yang besarnya 3,860. Nilai minimumnya ialah 51 dan nilai maksimumnya ialah 68.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilaksanakan melalui pengujian *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Data yang normal ketika angka dari sinifikansinya $\geq 0,05$. Tabel 2 menampilkan temuan uji normalitas.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardize d Residual	
N		115	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	3.27208913	
Most Extreme Differences	Absolute	.049	
	Positive	.045	
	Negative	-.049	
Test Statistic		.049	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.711	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.699
		Upper Bound	.722

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai signifikan dari temuan uji normalitas yang besarnya $0,200 > 0,05$, maknanya ialah dengan melanjutkan model dalam penelitian ini, data dalam penyelidikan ini memperlihatkan bahwa nilai residual normal distribusinya.

Uji Multikolinearitas

Dengan memakai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance Value*, pelaksanaan tujuan ini dalam hal penentuan apakah variabel independen (indeks) memiliki hubungan linier. Angka VIF < 10 , atau angka *tolerance* $> 0,10$. Multikolinearitas ditemukan apabila perolehan angka dari VIF atau *tolerance* sebaliknya. Tabel 3 menampilkan temuan pengujian multikolinearitas.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1	(Constant)	66.367	5.192		12.782	<.001		
	Total_X2	.292	.057	.415	5.116	<.001	.976	1.024
	X1	-.432	.088	-.401	-4.940	<.001	.976	1.024

Sumber: Data primer diolah, 2024

Nilai *tolerance* variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM sama-sama $0,976$ atau melebihi $0,1$ mengacu pada temuan uji multikolinearitas. Tidak ditemukan

tanda-tanda multikolinearitas karena nilai VIF variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM sama-sama tidak melebihi 10, yakni masing-masing 1,024.

Uji Heterokedastisitas

Penelitian ini menerapkan Uji *Glejser* yang pelaksanaannya melalui meregresi angka absolut residual ditinjau dari variabel independen. Ketika nilai signifikansi korelasi memperlihatkan perolehan melampaui angka 0,05, maka tidak ada indikasi heteroskedastisitas dan sebaliknya (Ghozali, 2016). Temuan uji heteroskedastisitas dapat diamati pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.067	3.026		.353	.725
	Total_X2	.025	.051	.047	.497	.620
	X1	.005	.033	.013	.141	.888

Sumber: Data primer diolah, 2024

Sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM memperlihatkan nilai signifikansi masing-masing yang besarnya 0,620 dan 0,888, yang melebihi nilai $\alpha = 0,05$, dengan mengacu pada temuan uji heteroskedastisitas. Hal ini memperlihatkan bahwa model regresi tidak memperlihatkan gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memakai analisis regresi berganda guna menguji dampak variabel independen ditinjau dari variabel dependen. Tabel 5 menampilkan perolehan pemrosesan data dengan perangkat lunak SPSS.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	9.603	2.288		4.197	<.001
	Sistem Pengendalian Internal	.789	.039	.885	20.451	<.001
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.021	.025	.036	.842	.402

Sumber: Data primer diolah, 2024

$$Y = 9,603 + 0,789X1 + 0,021X2$$

Berikut ini adalah hasil uji regresi berganda:

- Nilai variabel dependen (nilai Y) yang besarnya 9,603 apabila tidak adanya perubahan pada variabel independen (nilai X1 dan X2 = 0), yang diperlihatkan melalui nilai konstanta (α) yang besarnya 9,603.
- Variabel sistem pengendalian internal (X1) meraih angka koefisien regresi yang besarnya 0,789 dengan nilai positif, maknanya kualitas dari laporan keuangan akan terjadi peningkatan yang besarnya 0,789 apabila sistem pengendalian internal meningkat dengan 1 nilai.

Variabel kompetensi SDM (X2) meraih angka koefisien regresi positif yang besarnya 0,021, maknanya setiap peningkatan satu satuan pada kompetensi SDM maka mutu laporan keuangan juga akan mengalami peningkatan yang besarnya 0,021.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Karena penelitian ini memakai analisis regresi berganda dengan banyak variabel, maka dipilih nilai R kuadrat yang disesuaikan. Uji koefisien determinasi kemudian dilaksanakan untuk memastikan kontribusi variabel independen ditinjau dari variabel dependen. Intinya, koefisien determinasi (R^2) mengukur sejauh mana perubahan variabel dependen bisa diberikan penjelasan oleh model. Tabel 6 menampilkan nilai koefisien determinasi.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.892 ^a	.795	.791	1.455

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal

Sumber: Data primer diolah, 2024

Tabel diatas memperlihatkan besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,791 atau sebesar 79,1%, jadi dapat diambil kesimpulan seberapa besar dampak variabel sistem pengendai secara internal dan kompetensi SDM ditinjau dari kualitas laporan keuangan yang besarnya 0,791 (79,1%).

Uji Statistik F

Uji statistik F diterapkan untuk menentukan signifikan atau tidaknya model yang dipakai, serta agar dampak simultan variabel independen ditinjau dari variabel dependen dapat dinilai. Tabel 7 menampilkan uji F.

Tabel 7
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	919.615	2	459.807	217.251	<.001 ^b
	Residual	237.046	112	2.116		
	Total	1156.661	114			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM, dua variabel independen yang secara simultan memengaruhi laporan keuangan yang berkualitas, terbukti mampu

memaparkan variabel dependen secara simultan melalui hasil uji statistik F, yang juga memperlihatkan nilai signifikansi yang besarnya $0,001 < 0,05$.

Uji Statistik t

Untuk memastikan apakah variabel independen berdampak langsung yang substansial terhadap variabel dependen, diterapkan uji t. Ketika angka dari signifikansi suatu variabel kurang dari 0,05, variabel tersebut dianggap memiliki pengaruh. Tabel 8 menampilkan temuan dari penentuan nilai signifikansi setiap variabel.

Tabel 8
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	66.367	1.568		42.323	<.001
	Sistem Pengendalian Internal	-.432	.026	-.680	-16.359	<.001
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.292	.017	.704	16.940	<.001

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

Sumber: Data primer diolah, 2024

Variabel sistem pengendalian internal meraih angka signifikan yang besarnya $0,001 < 0,05$, artinya dilakukan penolakan H_0 dan penerimaan H_a . Hipotesis pertama (H_1) diterima karena hasil perhitungan statistik-t memperlihatkan bahwa variabel sistem pengendalian internal mempengaruhi mutu laporan keuangan. Melalui angka signifikansi $0,001 < 0,05$ untuk variabel kompetensi SDM, maka dilakukan penolakan H_0 dan penerimaan H_a . Hipotesis kedua (H_2) diterima karena hasil perhitungan statistik-t memperlihatkan bahwa variabel kompetensi SDM mempengaruhi mutu laporan keuangan.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Temuan hipotesis pertama (H_1) memperlihatkan bahwa ada bukti dampak sistem pengendalian internal ditinjau dari kualitas laporan keuangan. Mengingat bahwa $0,001 < 0,05$ merupakan nilai signifikan, maka dilakukan penolakan hipotesis (H_0) ditolak dan penerimaan hipotesis (H_a). Hal ini sebagai indikasi bahwa mutu laporan keuangan yang dihasilkan akan dipengaruhi oleh sistem pengendali secara internal. Sistem ini dikenal sebagai suatu organisasi merupakan alat dalam pengawasan efektivitas sumber daya manusianya dan sangat krusial dalam menghentikan dan mengidentifikasi penipuan (Herlita & Bayunitri, 2021).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal Pemerintah Kab. Solok Selatan berjalan dengan baik dan sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas. Selama proses disusunnya laporan keuangan, kebocoran dan penyimpangan laporan keuangan selalu dipantau secara ketat. Untuk memastikan bahwa pimpinan selalu memiliki strategi pengelolaan ke depan atau menekan risiko terjadinya pelanggaran sesuai dengan tujuan Instansi Pemerintah, maka dilakukan pemantauan oleh pimpinan melalui penilaian informasi, evaluasi, dan perbaikan secara terus-menerus.

Temuan penelitian ini relevan dengan temuan Mutiana, Diantimala, dan Zuraida (2017) yang menemukan bukti empiris yang mendukung pernyataan bahwa pengendalian

internal pada unit kerja di lingkungan Kementerian Agama Kab. Aceh Utara berdampak signifikan terhadap keandalan dan mutu laporan keuangan pemda tersebut. Menurut penelitian tersebut, perolehan laporan keuangan daerah yang memiliki kualitas meningkat seiring dengan efektivitas sistem pengendalian secara internal. Namun, temuan penelitian ini tidak relevan terhadap pernyataan Philadhelphia (2020) yang tidak menemukan hubungan antara sistem pengendalian secara internal terhadap kualitas dari laporan keuangan pemda.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Temuan hipotesis kedua (H2) memperlihatkan Dimana kualitas dari laporan keuangan mendapatkan pengaruh dari kompetensi SDM. Mengingat bahwa $0,001 < 0,05$ merupakan nilai signifikan, maka dilakukan penolakan hipotesis (H_0) dan penerimaan hipotesis (H_a). Hal ini sebagai indikasi bagaimana mutu laporan keuangan yang dihasilkan akan bergantung pada kompetensi SDM. Karena SDM menjadi komponen krusial, kompetensi mereka harus dikelola secara efektif setiap saat untuk menjamin bahwa mereka dapat memberikan kontribusi sebanyak mungkin terhadap upaya organisasi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan mereka (Eman *et al.*, 2022).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa dengan adanya staf yang kompeten di OPD Kabupaten Solok Selatan, proses penyusunan laporan keuangan akan lebih cepat karena staf tersebut sudah mengetahui dan memahami apa yang perlu dilakukan. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa penyusunan laporan keuangan relevan terhadap aturan dalam undang-undang yang sudah ditetapkan dan disampaikan tepat waktu serta dapat diandalkan. Hal ini sebagai indikasi bahwa semakin baik SDM SKPD, maka dari itu menjadikan laporan keuangan pemerintah daerah akan bertambah baik kualitasnya.

Temuan penelitian ini sejalan terhadap penelitian Tawaqal (2017) dan Hendri (2020) yang menemukan dimana kompetensi SDM menyumbangkan pengaruh signifikan pada kualitas dari laporan keuangan pemda. Namun, temuan penelitian ini tidak sejalan terhadap gagasan Philadhelphia (2020) yang memaparkan bahwa kompetensi SDM tidak berdampak pada mutu laporan keuangan pemda.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Temuan penelitian mencakup atas pengumpulan, pengolahan, dan analisis data memperlihatkan bahwa sistem pengendalian secara internal berdampak signifikan ditinjau dari kualitas laporan keuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa OPD Kabupaten Solok Selatan memberikan hasil yakni laporan keuangan pemda yang semakin bermutu apabila sistem internalnya dikendalikan dengan baik. Selain itu, mutu pelaporan keuangan sangat bergantung pada kompetensi SDM. Hal ini sebagai indikasi bahwa mutu laporan keuangan pemda yang diperoleh semakin meningkat dengan meningkatnya kompetensi SDM SKPD.

Keterbatasan

Hanya dua variabel penelitian menjadi salah satu keterbatasan penelitian ini. Mengingat terdapat 23 OPD di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Solok Selatan, tempat penelitian ini dilaksanakan, maka temuannya tidak dapat diekstrapolasi secara luas. Selain itu, metode pengumpulan data berbasis kuesioner dapat menimbulkan bias pada data yang dikumpulkan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Karena penelitian ini saat ini terbatas pada sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM ditinjau dari kualitas laporan keuangan, peneliti memberikan rekomendasi

untuk penelitian mendatang yang dapat mencakup unsur-unsur tambahan di luar yang termasuk dalam analisis ini, dengan mengacu pada pembahasan dan kesimpulan di atas. Diharapkan lebih banyak peneliti akan memakai metode wawancara untuk meningkatkan keakuratan hasil dan memperluas jumlah referensi yang ada kaitannya dengan topik yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya & Surjono. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas laporan Keuangan. *Jurnal Sikap* 2(1): 96–111.
- Agustin, H., Arza, F.I., (2019). Potrait of Accountability and Transparency in Local Budget Management by the Regional Government in West Sumatera Province, Indonesia: An Anomaly in Digital Era. *4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019)*. Padang. 154-166.
- Bandariy, H. (2011). Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas).
- Bondan S., Yohanes P., Ali Djahhuri, and Rosidi Rosidi. (2017). Kapabilitas Dinamis, Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kediri). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 19(2): 82–101.
- Eman, J., Pakaya, L., & Wuryandini, A. (2022). Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda. *Jambura Accounting Review*, 3(1), 23-36.
- Eveline, F. (2016). Pengaruh Sap Berbasis Akrua, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sdm, Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. : 1–14.
- Hendri, M, and Erin N.R. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2(1): 2479–93.
- Herlita, S., & Bayunitri, B. I. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7(1), 1805-1830.
- Indriasih, D. (2014). The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5 (20): 38-47.
- Irwan, D. (2011). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Tesis. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Karendra, I.A. (2016). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Perkembangan Usaha Pada Kpri Pertagama Kota Madiun Inggar. : 57–67.
- Kiranayanti, dkk. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(2).
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1):1-17.

- Mutiana, L, Yossi, D, and Zuraida, Z. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3(2): 151–67
- Nadir. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar (Studi Empiris Di Pemd Kabupaten Barru). *Akuntabel* 14(1): 57.
- Ningrum, K.K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. *E-Journal UAJY*: 39–54.
- Philadelphiah, Istiqomah Shinta, Sri Suryaningsum, and Sriyono Sriyono. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 2(1): 17–35.
- Rahmadani & Adriansyah. (2018). Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bukittinggi. 02(01): 65–80.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik* (1), 179–192.
- Shintia, C.I.A.P, and Erawati, N.M.A (2017). Pengaruh Kualitas SDM, Sistem Informasi, Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 2017(1): 1186–1205
- Subrata, I W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kemampuan Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas Laporan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Tesis. Denpasar: Universitas Udayana*
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suwanda, D. (2015). Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). *Research Journal of Finance and Accounting* 6(4): 139–57.
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM Dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemkab Kebumen) Akhmad Syarifudin. *Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, Desember 2014* 14(25): 26–44
- Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 6(2).
- Tawaqal, I, and Suparno. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 02(04): 125–35.

- Trisnawati, N.Y. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia.
- Trisnawati, N.Y, and Wiratmaja, D. N., (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi* 24: 768.
- Wahyuni, A. S., (2019). Kritik Teori Keagenan Dalam Artikel Akuntansi: Konteks Ke-Indonesia-An. *Akuntansi dan Teknologi Informasi* 12(2).